



Komunikasi Persuasif Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan)

Hairul Imam Mustafa

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Hamidy

hairulimammustafa@gmail.com

Artikel history

Received: 07-22-2024

Received in revised from

Accepted: 11-11-2024

Abstract: *Persuasive communication plays a crucial role in enhancing community participation in rural development. This study analyzes the persuasive communication strategies implemented by government officials in Tolonto Raja Pasean Village to increase community involvement in development programs. Three main approaches are used in this strategy: informative, participatory, and emotional. The informative approach aims to provide a clear understanding of the goals and benefits of the programs, while the participatory approach involves the community in planning and decision-making. The emotional approach emphasizes the values of togetherness and mutual cooperation to build a sense of shared responsibility. While persuasive communication can enhance participation, challenges such as differences in education levels, distrust towards the government, and limited communication infrastructure hinder its effectiveness. To overcome these challenges, it is important for the village government to adapt the delivery of information in an easily understandable and more transparent manner. The findings suggest that effective persuasive communication can strengthen the relationship between the government and the community, enhance participation, and support the success of rural development programs.*

Keywords: communication, participation, development.

**persuasive
community
rural**

Abstrak: Komunikasi persuasif memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi persuasif yang diterapkan oleh aparatur pemerintah di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan. Tiga pendekatan utama digunakan dalam strategi ini: informatif, partisipatif, dan emosional. Pendekatan informatif bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat program, sementara pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendekatan emosional menekankan nilai kebersamaan dan gotong royong untuk membangun rasa tanggung jawab bersama. Meskipun komunikasi persuasif dapat meningkatkan partisipasi, tantangan seperti perbedaan tingkat pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur komunikasi menghambat efektivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah desa untuk mengadaptasi penyampaian informasi dengan cara yang mudah dipahami dan lebih transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang efektif dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi, dan mendukung keberhasilan program pembangunan desa.

Pendahuluan

Komunikasi persuasif adalah salah satu pendekatan yang sangat penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, komunikasi persuasif berperan untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan pengetahuan mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Komunikasi persuasif bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar menerima, mendukung, dan terlibat dalam setiap inisiatif yang diperkenalkan oleh aparat pemerintahan, baik dalam bidang pembangunan fisik maupun sosial (Suahya, Firdausi, & Faturahman, 2021). Dengan kata lain, komunikasi persuasif bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang menciptakan hubungan saling pengertian dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan, yang menjadi objek dalam penelitian ini, fenomena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan kebijakan pemerintah menjadi salah satu masalah utama. Seperti halnya di banyak desa lainnya, masyarakat di Desa Tolonto Raja Pasien seringkali tidak aktif dalam terlibat dalam pengambilan keputusan atau proses pembangunan.

Ketidaktifan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan serta ketidakpercayaan terhadap kemampuan atau niat baik dari pemerintah desa (Hambali, Rizqi, & Syahfitri, 2024). Terkadang, ketidakpercayaan ini muncul karena adanya pengalaman masa lalu yang kurang memuaskan atau karena adanya persepsi bahwa kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Masalah ketidaktifan ini mengindikasikan pentingnya peran komunikasi persuasif dari aparat pemerintah desa. Komunikasi yang persuasif tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mereka mau berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program yang dilaksanakan. Komunikasi persuasif dalam konteks ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada, seperti ketidakpahaman tentang manfaat dari partisipasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta kecenderungan masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang mereka anggap tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka.

Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang efektif menjadi kunci penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam proses ini, aparat pemerintah harus mampu menyampaikan pesan yang jelas, meyakinkan, dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan strategi yang matang dan penerapan yang konsisten. Salah satu prinsip utama dalam komunikasi persuasif adalah memahami audiens atau penerima pesan. Dalam konteks ini, aparat pemerintah desa perlu memahami karakteristik masyarakat, baik dari segi pendidikan, latar belakang sosial, maupun persepsi mereka terhadap kebijakan yang ada di Desa Bulangan Pegantenan Pamekasan, keberhasilan komunikasi persuasif tidak hanya tergantung pada kemampuan aparat desa untuk menyampaikan pesan, tetapi juga pada cara mereka mengelola interaksi dengan masyarakat. Hal ini mencakup pendekatan-pendekatan yang membangun hubungan emosional, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan.

Agar komunikasi persuasif ini efektif, pemerintah desa perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan masukan yang datang dari mereka. Masyarakat yang merasa didengarkan dan dihargai akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Pranoto, 2020). Salah satu cara yang dapat digunakan oleh aparat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui pendekatan yang lebih

informatif. Dengan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai program-program yang akan dijalankan, masyarakat akan merasa lebih paham mengenai manfaat dan tujuan dari program tersebut. Misalnya, ketika ada program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya, pemerintah desa dapat menjelaskan bagaimana program tersebut akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka, baik dalam hal peningkatan aksesibilitas, pengurangan biaya transportasi, ataupun peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu mengurangi ketidakpahaman yang dapat menghambat partisipasi.

Selain pendekatan informatif, pendekatan yang lebih partisipatif juga sangat penting dalam komunikasi persuasif. Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, mereka akan merasa memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan desa, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Pendekatan ini juga membantu menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang ada, sehingga masyarakat lebih merasa bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Namun, dalam pelaksanaan komunikasi persuasif di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketidakpercayaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya atau kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, aparat pemerintah desa perlu bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya, informasi mengenai penggunaan dana desa atau pelaksanaan program-program pembangunan harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga mereka merasa yakin bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan mereka. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman antara aparat dan masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam komunikasi persuasif. Untuk mengatasi hal ini, aparat desa perlu menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi dan menggunakan metode komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Silva, Mustafa, Sedu, & Kedoh, 2024). Selain itu, penggunaan media yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, seperti papan pengumuman, pertemuan tatap muka, atau media sosial, juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, komunikasi persuasif yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Komunikasi persuasif yang efektif mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, sehingga tujuan pembangunan yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih baik. Dalam hal ini, keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada kemampuan aparatur pemerintah untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mampu menyampaikan pesan yang relevan dan meyakinkan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang fokus pada aparat pemerintahan desa dan masyarakat Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi komunikasi persuasif yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian

ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana komunikasi persuasif diterapkan dalam konteks desa tersebut serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Wawancara mendalam dilakukan dengan aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang strategi komunikasi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan. Wawancara ini juga memberikan wawasan tentang sejauh mana komunikasi persuasif berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program (Mustafa & Munib, 2025).

Selain wawancara, teknik observasi partisipatif juga diterapkan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan di desa, mengamati interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mencatat bagaimana komunikasi berlangsung dalam pertemuan-pertemuan atau kegiatan sosial. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika komunikasi yang terjadi, serta memberikan informasi tambahan mengenai cara masyarakat merespon pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Dokumentasi juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Berbagai dokumen seperti peraturan desa, laporan kegiatan, serta catatan terkait program-program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa dikumpulkan dan dianalisis. Dokumentasi ini membantu memberikan konteks lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan dan program yang berhubungan dengan komunikasi persuasif, serta memberikan bukti konkret mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program-program tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, untuk kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan strategi komunikasi persuasif dan partisipasi masyarakat (Munib, Asy'ari, & Qorib, 2024). Selanjutnya, data yang telah disaring akan disajikan secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis akan digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat di Desa Bulangan Barat Palengaan Pamekasan.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Komunikasi Persuasif Aparatur Pemerintah

Komunikasi persuasif merupakan salah satu strategi penting yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam membangun hubungan yang positif dengan masyarakat di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan, pendekatan komunikasi persuasif diterapkan oleh aparat pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan. Strategi komunikasi persuasif ini terdiri dari berbagai pendekatan, yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan pengetahuan mereka, serta mengubah sikap dan perilaku agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa (Hanana, Elian, & Marta, 2017). Pendekatan-pendekatan yang diterapkan di desa ini mencakup pendekatan informatif, partisipatif, dan emosional, yang semuanya saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan pertama yang digunakan oleh aparat pemerintah Desa Tolonto Raja Pasean adalah pendekatan informatif.

Melalui pendekatan ini, pemerintah desa berusaha memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai berbagai program pembangunan yang akan dijalankan. Informasi yang disampaikan meliputi tujuan, manfaat, serta dampak yang diharapkan dari program-program tersebut bagi masyarakat desa. Misalnya, jika ada program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan

atau pembangunan fasilitas umum lainnya, aparat pemerintah menjelaskan bagaimana program tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti mempermudah akses transportasi atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami program-program yang ada dan merasa yakin bahwa program tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Mustafa & Munib, 2025). Selain itu, pendekatan informatif ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpahaman atau keraguan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Pendekatan kedua yang diterapkan adalah pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai program pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan akan merasa lebih dihargai dan diakui peranannya dalam menentukan arah pembangunan desa. Partisipasi aktif dari masyarakat juga memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif, yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berdiskusi, memberikan masukan, serta bersama-sama merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Munib, Asy'ari, & Qorib, 2024).

Pendekatan ketiga yang digunakan oleh aparat pemerintah Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan adalah pendekatan emosional. Dalam pendekatan ini, pemerintah desa berusaha untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan gotong royong di kalangan masyarakat. Nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan saling membantu diangkat sebagai landasan untuk membangun rasa kepedulian terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bersama-sama bekerja demi kemajuan desa, dengan menekankan pentingnya gotong royong dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Pendekatan emosional ini berfokus pada pembangunan hubungan sosial yang erat antarwarga desa, sehingga mereka merasa lebih terhubung satu sama lain dan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas hidup di desa mereka. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung (MT & Nurjaman, 2024).

Kombinasi dari ketiga pendekatan ini -informatif, partisipatif, dan emosional- merupakan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan. Pendekatan informatif membantu masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari program-program yang ada, sedangkan pendekatan partisipatif memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam merencanakan dan mengambil keputusan tentang pembangunan. Sementara itu, pendekatan emosional menciptakan ikatan sosial yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul rasa tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Meskipun demikian, pelaksanaan strategi komunikasi persuasif ini tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh aparat pemerintah Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan dalam menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Mustafa & Munib, 2025). Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan latar belakang sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi sejauh mana mereka dapat menerima dan memahami informasi yang disampaikan. Guna mengatasi tantangan ini, aparat pemerintah perlu terus berinovasi dalam cara penyampaian pesan dan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Misalnya, mereka dapat menggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, seperti mengadakan pertemuan tatap muka, menggunakan papan pengumuman yang mudah dibaca, atau memanfaatkan media sosial yang kini semakin banyak digunakan oleh warga desa.

Selain itu, aparat pemerintah juga harus lebih intens dalam membangun hubungan personal dengan masyarakat, agar tercipta rasa saling percaya yang lebih kuat antara pemerintah dan warga desa. Keberhasilan strategi komunikasi persuasif yang diterapkan di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan juga sangat bergantung pada kemampuan aparat pemerintah untuk menjaga transparansi dalam setiap program yang dijalankan. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa terbuka dan jujur dalam pengelolaan program akan lebih cenderung untuk terlibat aktif. Oleh karena itu, penting bagi aparat pemerintah untuk selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program.

Hambatan dalam Komunikasi Persuasif

Aparatur pemerintah di Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan menghadapi sejumlah hambatan dalam melaksanakan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung komunikasi yang efektif. Tanpa adanya sarana yang memadai, baik berupa alat komunikasi, ruang pertemuan, ataupun sistem informasi yang transparan, akan sulit bagi aparat pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pesan-pesan yang jelas dan meyakinkan (Hambali, Rizqi, & Syahfitri, 2024). Di beberapa daerah desa, fasilitas komunikasi masih terbatas, dan hal ini memperburuk tantangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketergantungan pada saluran komunikasi tradisional, seperti pengumuman lisan atau pertemuan tatap muka, yang mungkin tidak dapat menjangkau semua warga dengan efektif, menjadi kendala dalam menyebarkan informasi secara luas.

Selain masalah fasilitas dan infrastruktur, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah desa juga menjadi hambatan besar dalam komunikasi persuasif. Ketidakpercayaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk sebelumnya yang melibatkan ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai harapan. Masyarakat yang pernah merasa kecewa dengan janji-janji yang tidak ditepati atau dengan kebijakan yang dianggap tidak adil cenderung merasa skeptis terhadap niat baik pemerintah. Hal ini membuat mereka enggan untuk terlibat dalam program-program yang diselenggarakan, meskipun program tersebut seharusnya memberikan manfaat langsung bagi mereka. Ketidakpercayaan ini memperburuk komunikasi persuasif yang seharusnya dapat mengundang partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa ragu untuk menerima informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Tanpa adanya dasar kepercayaan, masyarakat akan cenderung menutup diri terhadap inisiatif pemerintah, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan desa.

Masalah lain yang juga berkontribusi terhadap hambatan dalam komunikasi persuasif adalah perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman antara aparat dan masyarakat. Desa Tolonto Raja Pasean, seperti banyak desa lainnya, dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Banyak warga yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurang terbiasa dengan istilah atau konsep-konsep yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam menyampaikan pesan (Pranoto, 2020). Hal ini sering kali menyulitkan aparat pemerintah dalam menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Ketika aparat pemerintah menggunakan bahasa atau istilah yang lebih teknis atau kompleks, sebagian masyarakat mungkin merasa kesulitan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas komunikasi persuasif. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang sosial juga bisa memperburuk ketidaksesuaian dalam cara komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin merasa lebih sulit untuk memahami tujuan pembangunan atau kebijakan yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, pesan-pesan persuasif yang disampaikan oleh aparat pemerintah bisa saja tidak sampai kepada sasaran secara efektif.

Hambatan-hambatan ini saling berinteraksi dan memperburuk tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi persuasif yang tidak efektif berpotensi membuat masyarakat tetap apatis atau bahkan menolak untuk berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat pemerintah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya, agar tujuan komunikasi persuasif dapat tercapai dengan baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur komunikasi yang ada di desa. Pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern, seperti media sosial atau aplikasi pesan instan, untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat dan luas kepada masyarakat (Silva, Mustafa, Sedu, & Kedoh, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi, aparat pemerintah bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih efisien, meskipun dengan terbatasnya pertemuan tatap muka. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mengurangi ketergantungan pada metode komunikasi tradisional yang mungkin hanya dapat dijangkau oleh sebagian kecil masyarakat.

Selain itu, untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penting bagi aparat pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih transparan dan akuntabel dengan masyarakat. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana desa, pelaksanaan program pembangunan, serta hasil yang telah dicapai. Pemerintah desa harus terbuka dalam menyampaikan laporan perkembangan program, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan yang diterapkan memang memberikan dampak positif bagi mereka. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, dapat memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengarkan, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diusulkan dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, aparat pemerintah perlu menyesuaikan cara penyampaian pesan agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah teknis yang sulit dimengerti oleh masyarakat dapat membantu dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif. Selain itu, penggunaan media komunikasi yang lebih visual, seperti poster, spanduk, atau video, juga dapat

membantu dalam menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, untuk menjelaskan sebuah program pembangunan, pemerintah desa bisa membuat video yang menunjukkan langsung bagaimana program tersebut akan dilaksanakan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Mustafa & Munib, 2025). Dengan cara ini, masyarakat akan lebih mudah memahami informasi dan merasa lebih tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, dalam rangka mengatasi hambatan komunikasi yang muncul akibat perbedaan tingkat pendidikan, penting bagi aparat pemerintah untuk melakukan pendekatan yang lebih personal dan langsung kepada masyarakat. Pemerintah dapat mengadakan pertemuan rutin, baik dalam bentuk musyawarah desa atau forum diskusi, untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Pertemuan-pertemuan ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan program-program yang sedang atau akan dijalankan secara lebih mendalam, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang mereka pahami.

Pengaruh Komunikasi Persuasif terhadap Partisipasi Masyarakat

Komunikasi persuasif memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan desa, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Ketika komunikasi persuasif diterapkan secara efektif, masyarakat akan merasa lebih terlibat, dihargai, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat sangat bergantung pada seberapa baik aparat pemerintah dapat membangun hubungan yang saling mendukung dengan masyarakat, serta sejauh mana masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan (MT & Nurjaman, 2024). Salah satu aspek penting dari komunikasi persuasif yang efektif adalah kemampuan aparat pemerintah untuk menjelaskan program-program pembangunan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Ketika informasi yang disampaikan jelas dan dapat diterima dengan baik, masyarakat akan merasa lebih yakin untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Penggunaan pendekatan yang tepat dalam komunikasi seperti pendekatan informatif, partisipatif, dan emosional dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat program-program tersebut.

Ketika masyarakat memahami bagaimana program tersebut dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif. Informasi yang disampaikan dengan cara yang persuasif tidak hanya memberikan pemahaman tentang manfaat langsung dari program, tetapi juga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam mewujudkan tujuan bersama. Namun, pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik informasi disampaikan. Faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-program pembangunan. Partisipasi dalam tahap perencanaan sangat penting karena masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan mereka. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, kemauan pemerintah untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi persuasif. Pemerintah yang responsif terhadap aspirasi dan masukan masyarakat akan menciptakan iklim yang mendukung partisipasi aktif.

Masyarakat cenderung akan merasa lebih percaya dan menghargai pemerintah yang mampu menanggapi kebutuhan mereka secara serius. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mendengarkan atau tidak merespons dengan baik, masyarakat akan merasa bahwa partisipasi mereka tidak memiliki arti, sehingga mereka akan cenderung enggan untuk terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, komunikasi persuasif yang berhasil bukan hanya tentang penyampaian informasi yang efektif, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat (Mustafa & Munib, 2025). Komunikasi persuasif yang melibatkan pendekatan emosional seperti penekanan pada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa memiliki dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Pendekatan emosional ini membangun ikatan sosial yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggap sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan pembangunan dan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif.

Namun, pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, latar belakang sosial, atau pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ketika aparat pemerintah tidak mampu menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, atau jika pesan tersebut tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, partisipasi masyarakat bisa terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan cara penyampaian pesan agar lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat setiap individu memiliki latar belakang dan pemahaman yang berbeda. Pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang mungkin muncul akibat pengalaman buruk di masa lalu atau persepsi bahwa pemerintah tidak transparan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan, dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat (Hanana, Elian, & Marta, 2017). Masyarakat yang merasa ragu terhadap niat baik pemerintah cenderung lebih enggan untuk berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dapat mempercayai pemerintah untuk menjalankan program dengan jujur dan adil, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Selain itu, pengaruh komunikasi persuasif terhadap partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Komunikasi yang bersifat satu arah, di mana pemerintah hanya menyampaikan informasi tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi atau memberikan masukan, sering kali tidak efektif dalam mendorong partisipasi. Sebaliknya, komunikasi yang bersifat dua arah, di mana masyarakat diberi ruang untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah, lebih mampu membangun keterlibatan yang lebih mendalam. Pemerintah yang aktif mendengarkan aspirasi masyarakat dan bersedia menyesuaikan kebijakan mereka berdasarkan masukan yang diterima akan lebih berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Bulangan Barat Pegantenan Pamekasan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang jelas, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menekankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, komunikasi persuasif berhasil menciptakan rasa kepedulian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Masyarakat yang awalnya kurang terlibat, kini lebih memahami manfaat dari program-program tersebut, serta merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih perlu diatasi untuk memastikan komunikasi persuasif yang lebih efektif di masa depan. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya fasilitas dan infrastruktur komunikasi yang memadai, yang menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Fasilitas komunikasi yang lebih baik, seperti penggunaan media sosial atau alat komunikasi digital lainnya, dapat membantu menjangkau lebih banyak warga desa dan mempermudah penyebaran informasi.

Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ketidakpercayaan ini sering kali muncul akibat pengalaman buruk sebelumnya atau persepsi bahwa kebijakan pemerintah tidak transparan atau tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, aparat pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program yang dijalankan, serta menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap langkah pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih percaya dan cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi. Perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi tantangan dalam komunikasi persuasif. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan cara penyampaian yang lebih mudah dipahami akan membantu masyarakat dari berbagai latar belakang untuk lebih memahami pesan yang disampaikan. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih sering mengadakan pertemuan langsung untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan menjelaskan secara rinci program-program yang akan dijalankan.

Dengan demikian, meskipun komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tolonto Raja Pasean sudah efektif, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih maksimal. Melalui pemecahan hambatan-hambatan ini, diharapkan komunikasi persuasif dapat semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dan mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Hambali, D., Rizqi, R. M., & Syahfitri, I. D. (2024). Membangun Kemandirian Ekonomi (Program Literasi Keuangan untuk Masyarakat Desa Ongko). *Al Madani (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat)* Vol. 3, No. 2, Vol. 3, No. 2, 116-128.
- Hanana, A., Elian, N., & Marta, R. (2017). Strategi Komunikasi Persuasif dalam Menciptakan Masyarakat Sadar Wisata Di Kawasan Wisata Pantai Padang, Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 6, No. 1, 34-46.
- MT, A. D., & Nurjaman, R. (2024). Analisis Level Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Tobati Dan Doyo Lama Jayapura. *Musamus Journal of Public Administration*, Vol. 7, No. 1, 196-205.
- Munib, A. (2024). Mitologi Nasionalisme dalam Foto Jurnalistik (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 22-31.

- Munib, A., Asy'ari, M., & Qorib, F. (2024). Eksposisi Humor Kiai Lokal dalam Mengedukasi Keagamaan Masyarakat Madura. *Journal of Da'wah and Islamic Communication*, 1-10.
- Mustafa, H. I., & Munib, A. (2025). Optimalisasi Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Pendidikan. *Wirayudha: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 01, 13-24.
- Pranoto, J. A. (2020, June 12). Strategi Komunikasi Partisipatif Kepala Desa Pada Program Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma). *In Seminar Ilmu-Ilmu Sosial*, pp. 39-64.
- Silva, W. C., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2024). PKM Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Desa di Kabupaten Pinrang. *Pinisi Journal of Community Service*, Vol 4 No 3, 99-105.
- Sucahya, M., Firdausi, I. A., & Faturahman, W. (2021). Pemberdayaan Laz Harfa Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 29-41.